

ANTARA FIKSI DAN SEJARAH: KRISTALISASI KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK DALAM NOVEL *RASA MERDIKA*

Agus Sulton

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan(FIP),
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
agus_sul@yahoo.com

ABSTRACT

Rasa Merdeka is a novel released in 1924. This novel narrates the people's misery occurred in Dutch- Indies era. The internationalism ideology becomes the alternate understanding for people by using poetry as a messenger. In this research, the social, economical and political conditions depicted in the novel will be correlated to the history when the novel is created. using Goldmann's theory, considered having homological relations with the social structure. Umar Junus takes advantage of it as a story to depict the social-cultural condition of society.

Keywords: *Rasa Merdeka*, sociology of literature, internationalism

ABSTRAK

Rasa Merdeka merupakan novel bacaan liar yang terbit tahun 1924. Novel ini membicarakan tentang penderitaan rakyat yang terjadi di Hindia Belanda. Ideologi internasionalisme menjadi alternatif pemahaman kepada rakyat dengan memanfaatkan sastra sebagai alat penyampai pesan. Dalam penelitian ini, kondisi sosial, ekonomi, dan politik novel akan korelasikan terhadap sejarah saat novel itu diciptakan kemudian menghubungkan konsep keduanya menggunakan teori Goldmann, dianggapnya memiliki keterkaitan homologis dengan struktur sosial (kondisi).

Kata kunci: *Rasa Merdeka*, sosiologi sastra, internasionalisme

PENDAHULUAN

Fiksi adalah dunia imajinasi yang tidak terlepas dari zamannya saat sebuah karya itu diciptakan. Sebuah karya sastra bisa jadi sebuah cermin sejarah atau dokumen sejarah, namun sampai sejauh mana tingkat objektifitas data terkait itu mampu dimunculkan secara utuh. Fiksi berada di dunia imajinasi sedangkan sejarah berada di dunia realitas yang dipertegas dengan beberapa sumber penguat agar keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Sapardi Djoko Damono (2002:1) sastra menampilkan kehidupan dan ke-

hidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial.

Novel *Rasa Merdeka* adalah karya Soemantri salah satu novel yang dinilai mempunyai motif ideologi semangat zaman saat karya itu diciptakan. Novel ini ditulis di penjara Semarang, lantaran melanggar artikel 161 bis dari *strafwet-book* (KUHP). Artikel 161 bis dikeluarkan sebagai respon terhadap pemogokan VSTP. Artikel 161 bis berisi undang-undang larangan mogok. (Soegiri DS dan Edi Cahyono, 2003:131-132). Selama di penjara Soemantri menulis dua Novel sekaligus, yakni *Rahasia Terboeka* dan *Rasa Merdeka*. Namun novel

Rasa Merdeka sebelumnya sudah pernah dimuat bersambung surat kabar Sinar Hindia sebagai *feuilleton*, kemudian tahun 1924 diterbitkan Druk-kerij VSTP Semarang berupa buku.

Realitas sosial di dalamnya sangat nampak bahwa novel *Rasa Merdeka* sebagai karya atas kegelisahan Soemantri terhadap kondisi di Hindia Belanda saat itu. Sastra Novel sebagai wadah dalam mengungkapkan ketimpangan sosial, dan media propaganda kepada pembaca agar mereka tersadar untuk membuka hati terhadap kondisi yang dialami dan berani untuk melakukan protes. Memang semenjak tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda membuat beberapa peraturan baru yang mengubah Indonesia menjadi sebuah jajahan yang bersistem liberal, perkebunan yang dulunya dimonopoli pemerintah, kini boleh diusahakan modal-modal swasta. Sistem kerja paksa dan rodi dihapus dan diganti dengan sistem kerja upah secara bebas. (Soe Hok Gie, 1999:7). Berakibat memberikan dampak terhadap para pemodal Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk membuka pabrik-pabrik, perkebunan tembakau, transportasi. Bermula dari sini kapitalis mulai berkembang dengan pesat, akibatnya membawa perubahan pada kondisi masyarakat yang semakin sengsara.

Dalam aplikasinya, politik etis yang diperlakukan pemerintah Belanda berakibat pada rakyat berakhir kesusahahan dan kemelaratan. Pemerintah bertambah rakus melakukan monopoli perdagangan terhadap barang dagangan yang pemerintah perlukan dan penyewaan lahan-lahan garapan rakyat secara paksa untuk ditanami tebu. Menurut pengamatan Soejanmo (Soemantri, 1924: 4-5), penderitaan rakyat semakin terpuruk dan tidak tahan lagi melihat kondisi masyarakat di desa-desa yang dilihatnya setiap hari. Soedjanmo sangat gelisah ingin mencari

sebab-sebab dari kemiskinan rakyat di desanya padahal tanah persawahan sangat luas dan subur untuk ditanami padi. Gambaran seperti pada masa novel itu diciptakan merupakan kenyataan apa yang terjadi pada masyarakat Hindia Belanda saat itu. Menurut pandangan sejarawan Ricklefs (2005: 227) bahwa pada permulaan abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan politik etis. Kebijakan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar sedemikian rupa di lingkungan penjajahan.

Struktur kemasyarakatan Indonesia yang terdapat di Jawa masa itu, justru dipergunakan kaum kapitalis asing (Belanda) untuk mencapai tujuan mereka. Walaupun pengusaha-pengusaha perkebunan tidak dapat memiliki tanah, namun mereka dapat dan berhak menyewa dari pemerintah atau Bumiputera. Kemudian, dengan kekuasaan uangnya mereka berhasil memaksa desa-desa menyewakan tanah-tanah desa dan biasanya dengan memberikan premi tertentu kepada kepala-kepala desa (Soe Hok Gie, 1999: 7).

Akibat dari sistem inilah rakyat berbondong-bondong pergi ke kota untuk menjadi buruh. Para pemodal yang mempunyai pabrik dan lahan bisnis memperkerjakan buruh dengan upah yang minim karena banyaknya tenaga manusia yang memerlukan pekerjaan, berakibat tingkat kesejahteraan buruh terabaikan. Jam kerja yang tidak seimbang dengan uang yang diterima dan tersedianya tempat-tempat hiburan yang bersifat mempengaruhi rakyat un-

tuk bersikap boros disediakan oleh para pemodal.

Bersumber dari sistem pemerintah yang semakin terpuruk, rakyat yang sadar untuk perbaikan syarat-syarat ekonomi, sosial, dan politik, para buruh menyatukan diri dalam wadah organisasi berupa serikat-serikat buruh. Di dalam masyarakat kapitalis, pentingnya menyatukan diri adalah karena kaum buruh menghadapi kekuatan-kekuatan yang berpotensi unggul. Kendati tidak keluar dari jangkauan kapitalisme, serikat buruh yang baru saja muncul dan bergerak, sudah menghadapi tindakan-tindakan represif pihak majikan-majikan kapitalis dan pemerintah-pemerintah borjuis. (Soegiri DS, 2003: 7)

Dari sinilah kaum pergerakan semakin militan, kaum terpelajar pribumi berhaluan kiri melakukan pergerakan baik melalui karya sastra atau aksi-aksi protes. Kondisi pemerintah di Hindia Belanda yang sangat korup membuat rakyat semakin menderita dan kesengsaraan terjadi di mana-mana. Berangkat dari situasi semacam itu, penulis berusaha untuk mengungkap hasil penangkapan atau rekaman karya fiksi pada saat di mana karya itu diciptakan dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan politik.

Perhatian kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam novel *Rasa Merdeka* sebagai pernyataan kecenderungan yang berupaya untuk melakukan propaganda tokoh-tokoh di dalamnya, seperti Soedjanmo, Sastro, dan Soedarmo. Muara ini diupayakan menarik teks dan konteks persoalan yang terjadi pada saat itu terhadap isu kepentingan para penguasa dengan rakyat *kromo* Hindia Belanda yang mempunyai kesempatan besar untuk tujuan fundamentalnya, yakni penyebaran ideologi komunis dan anti kolonialisme, imperialisme, kapitalisme.

Keadaan yang terjadi dalam novel

Rasa Merdeka dan kondisi masyarakat yang terjadi pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari teori yang dikemukakan Goldmann dianggapnya memiliki hubungan homologis dengan struktur sosial (kondisi), kemudian Umar Junus memanfaatkan hal demikian sebagai suatu cerita dianggap membayangkan keadaan sosiobudaya suatu masyarakat.

Tulisan ini bertujuan menampilkan kristalisasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam novel *Rasa Merdeka* terhadap sejarah rakyat di Hindia Belanda pada saat karya itu diciptakan. Kajian ini diharapkan memperkaya muatan sejarah politik kesusastraan. Bacaan-bacaan layaknya novel yang dihasilkan oleh para tokoh pergerakan tahun 1923 dimanfaatkan untuk menyebarkan dan memperkenalkan ideologi internasionalisme kepada rakyat Hindia Belanda. Pandangan ideologi internasionalisme dirasa sebagai solusi yang baik untuk menanggulangi sebab-sebab kemiskinan rakyat, dengan cara pembagian hasil sama rata, dengan begitu nafsu ingin dihormati akan lenyap dengan sendirinya.

METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian novel *Rasa Merdeka*, dipergunakan metode kualitatif, dengan studi pustaka. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2005: 5). Perhatian kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam novel *Rasa Merdeka* sebagai pernyataan untuk menarik teks dan konteks persoalan yang terjadi pada saat itu terhadap isu kepentingan para penguasa dengan rakyat *kromo* Hindia Belanda yang mempunyai kesempatan besar untuk tujuan fundamentalnya, yakni penye-

baran ideologi komunis dan anti kolonialisme.

Keadaan yang terjadi dalam novel *Rasa Merdeka* dan kondisi masyarakat yang terjadi pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari teori yang dikemukakan Goldmann dianggapnya memiliki hubungan homologis dengan struktur sosial (kondisi), kemudian Umar Junus memanfaatkan hal demikian sebagai suatu cerita dianggap membayangkan keadaan sosiobudaya suatu masyarakat.

Tahapan kerja analisis kualitatif deskriptif untuk melihat *Rasa Merdeka* pada pemaparan di atas tidak bisa lepas tanpa berbagai materi ilmiah yang terkait mengenai sejarah sosial, ekonomi, dan politik pada masanya untuk dijadikan sebagai data pustaka, perihal kristalisasi yang terdapat dalam novel *Rasa Merdeka*. Keseluruhan data tersebut sebagai perangkat pisau untuk menganalisis melalui pendekatan sosiologi sastra. Wiyatmi (2006: 97) menyatakan, bahwa pendekatan sosiologi sastra merupakan perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan.

Karya sastra sebagai simbol verbal mempunyai beberapa peranan di antaranya sebagai cara pemahaman, cara berhubungan, dan cara penciptaan. Objek karya sastra adalah realitas apa pun juga yang dimaksud dengan realitas oleh pengarang. Karya sastra sebagai cara penciptaan, kadar aktualitas atau faktisitasnya lebih rendah dari pada imajinasi pengarang. Perbedaan ini lebih merupakan asumsi teoritis yang dalam pelaksanaannya sukar membedakan cara-cara itu dalam sebuah atau di antara karya-karya sastra (Kuntowijoyo, 2006: 171-172).

Teori sosiologi sastra berusaha untuk melakukan kajian sastra dengan sudut pandang sosiologi dan sastra. Me-

mandang kehidupan manusia dalam sebuah karya sastra dengan pendekatan sosiologi. Menurut Swingwood (1973) penyelidikan terhadap sosiologi sastra terbagi dalam dua corak. Pertama, pembicaraan sosiologi sastra dimulai dengan lingkungan sosial untuk masuk dalam hubungan sastra dengan faktor luar, seperti terbayang dalam novel *Rasa Merdeka*. Peran serta semangat zamannya diilhami sebagai bentuk gambaran dari realitas masyarakat pada saat karya itu diciptakan, maka analisis yang dilakukan terhadap karya dapat mengkaitkan unsur luar untuk dasar prespektif pemahaman yang sistematis. Penyelidikan ini melihat faktor sosial yang menghasilkan pada masa tertentu, dan masyarakat yang melingkupinya. Kedua, sosiologi sastra menghubungkan struktur karya kepada genre dan masyarakat.

Sudut pandang sosiologi sastra dipandang sebagai akibat dari sebab-akibat dan pengarang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini, sebuah karya sastra merupakan dokumen dan sebagai dokumen kekuatan yang telah menghasilkannya (Endraswara, 2013: 30). Hal ini menyatakan kalau sastra sebagai dokumen sosiobudaya dan merekam akan zamanya. Umar Junus (1986: 19) menambahkan bahwa pembicaraan tentang pengaruh sosiobudaya terhadap penciptaan karya sastra ditumpukan kepada teori pertentangan kelas yang dilandasi oleh teori Marx.

Oleh karena pendekatan Marxisme menggunakan prespektis sejarah, memahami apa yang telah berlaku dan bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat baru, sesuai dengan dasar ideologi mereka dan ke mana mereka melihat, maka ada dua sikap yang berbeda. Untuk yang sudah berlalu (kuno), mereka bersifat deskriptif karena suatu karya dihasilkan dengan keadaan kelas tertentu. Tetapi apabila melihat ke de-

pan (suatu masyarakat baru) maka ada dua sikap yang saling berhubungan. Pertama, melihat yang ada sebagai sesuatu yang baru dan harus ditiadakan. Dengan begitu, mereka dapat menerima sesuatu dan menolak yang lama meskipun tidak sejalan dengan landasan teori mereka, misalnya pada awalnya masyarakat yang tidak berpendidikan dalam novel *Rasa Merdeka* menerima tradisi-tradisi lama yang berlaku di Hindia Belanda, dengan datangnya ideologi komunis mereka sama-sama menentang kapitalisme (pemerintah), bersikap kritis dan radikal. Kedua, mereka minta ketaatan politik terhadap garis organisasi atau serikat, seperti yang terjadi dalam *vergadering*, membentuk wadah kebersamaan dan konsolidasi (Umar Junus, 1986: 20).

Substansi teori sosiologi sastra Marxisme yang diutarakan Goldmann dan Umar Junus memanfaatkan karya semacam ini sebagai sebuah dokumen sosiobudaya. Sastra menyuarakan suara kelas tertentu, sehingga sastra dapat disederhanakan dalam bentuk perjuangan kelas atau bahkan mengajarkan ideologi tertentu. Menurut Junus (1986: 19) pengaruh sosiobudaya terhadap penciptaan karya sastra ditumpukan kepada teori pertentangan kelas yang dilandasi oleh teori Marx, waktu dihubungkan dengan jiwa pada suatu zaman.

Dalam konsepsi sosiologi sastra Marxis yang diutarakan Goldmann dan Umar Junus memang jelas bahwa novel *Rasa Merdeka* melukiskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terindikasi semangat zamannya pada saat novel itu diciptakan. Tentulah hal ini tidak bisa terlepas begitu saja untuk menyebut karya itu sebagai gerakan propaganda ideologi komunis-internasionalisme kepada rakyat Hindia Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 1870 perkembangan industri menjadi demikian pesat. Di Yogyakarta tahun 1882 terjadi pemogokan buruh pabrik gula (PG) berturut-turut. Tahun-tahun berikutnya muncul organisasi buruh orang-orang Eropa. Berturut-turut lahir *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG) tahun 1897, *Staatsspoor Bond* (SS Bond) didirikan di Bandung tahun 1905, *Suikerbond* (tahun 1907), *Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Ned-Indie*, (VSTP) berdiri 1908 di Semarang, *Duanebond* tahun 1911, *Postbond* tahun 1912, *BOWNI* tahun 1912, dan *Pandhuisbond* tahun 1913.

Kemudian Edi Cahyono memberikan suatu pengamatan bahwa, program pendidikan yang merupakan salah satu program dalam politik balas jasa *Etische Politiek* di awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual Bumiputera. Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat buruh impor telah memicu serikat buruh dibangun oleh Bumiputera dalam nuansa-nuansa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah; Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911, Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912, Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) tahun 1914, Opium Regie Bond (ORB) tahun 1916, *Vereeniging van Indlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken* (VIPBOUW) tahun 1916, *Personeel Fabriek Bond* tahun 1917 (Cahyono, 2003).

Sejarah perserikatan buruh mulai semakin radikal saat Sneevliet datang ke Hindia Belanda pada tahun 1913. Organisasi atau serikat-serikat yang berkembang sebelumnya menjadi berhaluan pada ideologi komunisme. Setelah revolusi sosialis-komunisme di Rusia tahun 1917 memberikan dampak kebangkitan semangat komunisme di

Hindia Belanda. Organisasi Serikat Islam (SI) adalah tonggak terkuat yang berhaluan komunis. Karena prinsip komunisme dan semakin radikal hubungan internal SI mulai terjadi masalah. Kongres Nasional SI tanggal 20-27 Oktober 1917 terjadi perdebatan yang alot, berakibat SI pecah menjadi SI merah dan SI putih. SI merah (tahun 1924 berubah nama menjadi Serikat Rakyat) dipimpin oleh Semaoen sedangkan SI putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muis.

Analisis yang dilakukan Edi Cahyono (2003: xxvi) menyebutkan bahwa PKI melakukan agitasi menggunakan media masa. Tak sedikit media Islam adalah pula media komunis. Seperti dapat dijumpai di Semarang: *Sinar Hindia*, *Soeara Ra'jat*, *Si Tetap*, dan *Barisan Moeda*; di Surakarta (Solo) antara lain *Islam Bergerak*, *Medan Moeslimin*, *Persatoean Ra'jat Senopati*, dan *Hobromarkoto Mowo*; di Surabaya ada *Proletar*; di Yogyakarta terkenal dengan *Kromo Mardiko* dan di Bandung dengan *Matahari*, *Mataram*, *Soerapati*, dan *Titar*; di Jakarta ada dua, yaitu *Njala* dan *Kijahi Djagoer*.

Selain dari media masa berupa surat kabar, para organisasi pergerakan dan serikat-serikat melakukan propaganda dalam bentuk karya sastra; puisi, novel (cerita bersambung), dan drama (pertunjukan seni). Langkah ini dipermainkan untuk memberikan sebuah kritik (protes) terhadap pemerintah yang berkuasa. Menentang sistem feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme untuk menjadi negara yang merdeka. Ungkapan Razif (2005: 10) makna sebuah bacaan bukan sekedar sekumpulan propagandis dan agitator, akan tetapi juga sekumpulan organisatoris. Bacaan menjadi fasilitas komunikasi kaum *kromo*, mempermudah mereka membagi-bagi kerja, dan memandang hasil bersama yang mereka

capai dengan tenaga kerja yang terorganisir.

Novel *Rasa Merdeka* salah satu bagian termasuk di dalamnya. Persoalan kolonialisme dan imperialisme menjadi sorotan dan kritik bagi kalangan orang terpelajar waktu itu. Sastra dijadikan media sebatas untuk membuka pengetahuan kepada rakyat Bumiputera yang kurang mendapat pendidikan secara layak, di pihak lain sebagai alat agitator dan kritik kepada pemerintah yang berkuasa.

Kondisi Sosial

Permulaan abad ke- XX adalah dimulainya urbanisasi besar-besaran. Awal abad ini pula berkembangnya industri mesin-mesin masuk menggerakkan Jawa. Orang desa berbondong-bondong menduduki Batavia, Surakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Rakyat desa tersebut bekerja sebagai buruh kasar di kota-kota besar. Lahan leluhur yang digarap ditanami padi sebelumnya sudah beralih hak garap kepada pemodal pabrik dan perkebunan.

Menurut Soe Hok Gie (1999: 7) walaupun pengusaha-pengusaha perkebunan tidak memiliki tanah, tetapi mereka dapat dan berhak menyewa dari pemerintah atau Bumiputera. Dan dengan kekuasaan uangnya mereka berhasil memaksa desa-desa menyewakan tanah-tanah desa dan biasanya dengan memberikan premi tertentu kepada kepala-kepala desa. Sawah milik desa dari petani lalu dijadikan perkebunan-perkebunan. Sedangkan penduduknya secara masal dijadikan kulinya.

Dalam pandangan Soedjanmo di novel *Rasa Merdeka* mengatakan dia merasa kebingungan apa penyebab yang terjadi kemiskinan di desanya. Padahal tanah begitu luas dan tanaman begitu

subur. Suatu ketika pada saat pengembaraan Soedjanmo berkenalan dengan Kromotjiloko di dalam kereta. Kromotjiloko mengandung makna *kromo* berarti orang kecil yang hidup di desa, sedangkan *tjiloko* berarti celakan. Dalam kenyataannya tokoh Kromotjiloko memang seorang yang jatuh miskin. Mempunyai sawah peninggalan orang tua hanya 1½ bau selanjutnya disewa paksa oleh kaum bermodal. Kromotjiloko menceritakan tentang sebab musabab dia pergi menjadi buruh ke kota, dalam hal ini setidaknya mencerminkan tentang kemiskinan yang terjadi di Hindia Belanda.

Pada saat dialong keduanya; Soedjanmo dan Kromotjiloko menyebutkan bahwa diri Kromotjiloko adalah orang miskin dari desa yang sawahnya disewa oleh para pemodal.

Saja adalah seorang jang miskin. Di desa kediaman saja, desa Lapangmanis, saja ada mempoenjai sawah 1½ bouw tinggalan dari saja poenja orang toea jang soedah meninggal doenia. Saja tanami padi dapetlah menghatsilken kira-kira 30 datjin jang kalau saja djoel bisa lakoe koerang lebih 120 roepijah (Soemantri, 1924: 40).

Gambaran tersebut memperhatikan secara jelas kalau rakyat yang sebelumnya hidup melimpah; kebutuhan keluarganya tercukupi dengan hasil tanaman padi. Akhirnya berubah drastis akibat kaum kapitalis merebut sawah-sawah rakyat di desa. Hal ini menjadikan rakyat pergi menjadi kuli ke kota, seperti yang terjadi pada diri Kromotjiloko.

Ja....tetapi.....serenta di dekatnja saja poenja desa ada didirikan seboeah paberik goela jang baroe ada dalem tempo setahoen jang belakangan ini, sekarang saja terpaksa pergi dari saja poenja desa dengan meninggalkan saja poenja anak isteri, lantaran.....saja poenja sawah disewa

oleh paberik goela itoe, boeat ditanami teboe. (Soemantri, 1924: 40)

Kelas kapitalis dalam novel *Rasa Merdeka* ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik gula yang berkembang pada saat itu. Apa yang terjadi pada awal abad ke 20 adalah sebuah kesengsaraan monopoli yang terus terjadi pada rakyat-rakyat di desa. Memang pada saat di mana karya itu diciptakan, persoalan kemiskinan menjadi sorotan utama kaum pergerakan pribumi di Hindia Belanda.

Seperti apa yang dilakukan Soedjanmo melihat kondisi desa nungun ayahnya. Rakyatnya sangat miskin, namun Soedjanmo belum mampu menolong karena masih belum banyak mengerti penyebab dari kemiskinan itu. Dia merasa keberatan apabila disuruh magang pegawai negeri oleh Bey Soemo.

Kami kira, meskipoen akoe bekerdja setengah mati dalem pekerdjaankoe, toh akoe aken ta'dapet membikin apa-apa bagi menolong kromo keloear kesengsaraan jang soedah banjak kami selidiki di desa-desanja bapa ini. (Soemantri, 1914: 9)

Memang menjadi suatu penangan khusus untuk mengamati kondisi sosial dan ekonomi rakyat Hindia Belanda, tertama lingkungan Soedjanmo berada. Sebab hal yang nyata adalah lahan-lahan terhampar dengan luas tetapi tidak diimbangi dengan nasib rakyat sekitarnya. Persoalan tersebut membuat hati Soedjanmo bingung, tidak mampu bekerja apa-apa karena memikirkan pergaulan hidup umum.

Dalam tulisan Mas Marco Kartodikromo di *Sinar Djawa*, 26 Maret 1918 berpendapat betapa sengsaranya bangsa kita orang desa yang tanahnya sama disewa pabrik.....caranya pabrik gula hendak menyewa sawah orang-

orang desa itu yang sudah kejadian lantaran dari *politie* desa: Lurah, Carik *enz, enz*, jadi pabrik tidak usah rewel-rewel masuk keluar di rumah-rumah orang desa yang sawahnya hendak disewa pabrik. Banyak orang-orang desa bilangan pabrik Cepiring dan Gemuh *afdeling* Kendal, Semarang, bahwa mereka itu merasa terlalu menyesal sekali, karena sawahnya disewa oleh pabrik, sebab uang sewaan tanahnya dari pabrik itu lebih sedikit dari pada hasil kalau itu tanahnya dikerjakan sendiri.

Sikap kaum kapital ini menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Para petani itu kini tidak lebih daripada budak-budak belian. Areal perkebunan yang semakin lama semakin meluas ini, mengakibatkan semakin berkurangnya areal persawahan. Dengan mudah dapat dilihat bahwa produksi beras menjadi terus-menerus berkurang dalam perbandingan penduduk yang mengakibatkan naiknya harga beras. Kehidupan kaum buruh dan tani yang menggerakkan produksi tebu dan pabrik gula itu, kian lama kian buruk. Sebuah komisi Belanda sendiri di tahun 1900 telah melaporkan bahwa kehidupan rakyat Jawa dari hari ke hari semakin sengsara (Gie, 1999: 8).

Para penduduk desa ini sawahnya dipaksa oleh pesuruh para pemodal swasta. Orang-orang miskin dan bodoh di desa itu hanya tunduk dan takut kepada kaum atasan. Mereka diancam dengan berbagai cara agar sawahnya mau disewakan. Penduduk hanya marah tanpa sebab. Sebagaimana yang diungkapkan Soe Hok Gie (1999: 9) bahwa para lurah disuap dengan f 2,50,- untuk setiap bau sawah (1 bau=7096,50 m²) yang dapat disewa bagi perkebunan tebu, maka di desa-desa terjadi "pemaksaan" atas kaum tani untuk tidak menanam padi dan menggantinya dengan tebu.

Mengapa bapak memperkenankan

bahasa bapak poenja sawah disewa yang achirnja.....seperti sekarang bapak lantas pergi ke kota oentoeck djadi koeli?

Ja...ja.....bagaimana anakkoe, saja terpaksa sebab saja ketakoetan lantaran saja di... (Soemantri, 1924: 41).

Demikianlah kondisi rakyat di Hindia Belanda yang ketakutan ancaman dari atasan kalau sawah mereka tidak disewakan. Di desa-desa, tidak seorangpun yang membela para petani itu. Lurah-lurah mereka sudah sepenuhnya menjadi alat para pengusaha perkebunan. Untuk melepaskan diri dari kondisi semacam itu, hanya ada dua jalan tersedia bagi mereka. *Pertama*, lari ke kota-kota dan kedua, membakari tebu sebagai bentuk protes (Gie, 1999: 10). Selain dua alternatif tersebut, para penduduk yang tetap bertanah di desa, mereka bisa bekerja sebagai kuli di perkebunan tebu dengan gaji 20-40 sen/hari. Masyarakat yang awalnya makan nasi, beralih makanan pokok digantikan dengan jagung dan ampar pisang. (*Sinar Djawa*, 31 Januari dan 9 Februari 1918)

Bila produksi tebu (gula) dalam tahun 1900 berjumlah 744.257 ton, maka dalam tahun 1915 jumlah itu menjadi 1.319.087 ton, dalam tahun 1917 berjumlah 1.822.188 ton. Dengan demikian harga beras terus meningkat dan peningkatan ini diperhebat lagi oleh berkurangnya pengangkutan antara Indonesia dengan negeri-negeri penghasil beras lainnya di Asia Tenggara sebagai akibat Perang Dunia I. Sebagai indikasi, pada tahun 1918 beras Djawa nomor satu berharga f 14,-/pikul. Harga ini tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Harga yang dirasakan oleh rakyat sangat tinggi ini, pada tahun 1919 mengalami kenaikan lagi. Berita *Sinar Hindia*, 14 Januari 1919 No. 9, beras Siam seharga f 16,-/pikul, beras Djawa No. 1 seharga f 16,-/pikul, No. 2 seharga f 15,-/pikul, dan No. 3 seharga f

14,-/pikul (Yuliati, 2000: 42-43).

Selanjutnya Soe Gok Gie (1999: 20) kembali menambahkan bahwa dengan kekuasaan keuangannya, sejumlah orang berhasil memeras kekayaan alam Indonesia, sekaligus memeras rakyatnya. Kemiskinan yang lahir sebagai akibatnya menumbuhkan kriminalitas di kalangan rakyat Indonesia dalam bentuk perampokan dan kelaparan. Kesengsaraan itu menjadi semakin berat lagi oleh peperangan (Perang Dunia I). Perang ini disebabkan adanya persaingan antara kepentingan kaum kapitalis Eropa. Di dalam analisis mereka melihat perkebunan, terutama perkebunan tebu sebagai penyebab kemiskinan yang nyata. Dan cara mengatasinya hanyalah dengan sosialisme, yakni menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang penting bagi hajat hidup rakyat.

... hasil dari pekerdjaan boeroeh jang dikerdjaken dari sehari ke sehari itoe goenanja oentoek hidoep bersama. Goela jang diperboeat oleh boeroeh dalem paberik tidak bisa dihabiskan oleh boeroehnja sendiri, atau oleh toean paberik sendiri, tetapi dirasaken oleh segenap manoesia. Tetapi.....oentoengnja dari kehasilan itoelah jang tidak dirasaken oleh segenap manoesia, hanjalah oetoe toean paberik (Soemantri, 1924: 68).

Kemeskinan dan kekajaan itoe terbitnja dari tidak samanja pembagian hasil. Kalau sadja pembagian hasil di doenia bisa dibikin sama rata tentoe tidak ada kemeskinan (Soemantri, 1924: 28).

Kutipan tersebut menawarkan suatu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan penduduk desa. Dengan pembagian hasil sesuai prosedur dan sama rata, diharapkan kesejahteraan buruh akan terangkat dan kemiskinan rakyat bisa diantisipasi. Selain itu Mas Marco dalam tulisannya

di *Sinar Djawa*, 26 Maret 1918 menjelaskan apakah tidak lebih baik pemerintah menentukan harga tanah yang sama disewa pabrik tebu, misalnya: pabrik tidak boleh menyewa tanah orang desa kurang dari f 200,- sebauh di dalam 18 bulan. Kalau hal ini dilakukan, tentu bangsa kita orang desa tidak bakal sengsara lantaran adanya pabrik-pabrik gula.

Masalah pabrik gula merupakan masalah besar bagi rakyat Hindia Belanda. Pemerintah yang seyogyanya memperhatikan kepentingan rakyat terbanyak, tidak memperhatikannya dan malah memihak kepada kaum kapitalis. Menurut mereka pemerintah waktu itu mewakili kaum uang. Karena itu ia bertentangan dengan kepentingan kaum *kromo*, dengan rakyat terbanyak. Bahkan para anggota *Tweede Kamer* sendiri, berkepentingan dengan adanya pabrik-pabrik gula. Mereka mempunyai saham-sahamnya di sana. Pemerintah dan para pengusaha tidak memperhatikan rakyat dan bahkan karena mempunyai banyak uang mereka dapat membeli dan menyogok pegawai-pegawai pemerintah (Soe Hok Gie, 1999: 20 dan Soerjopranoto di *Sinar Djawa*, 20 Desember 1917)

Kondisi Ekonomi

Dalam novel *Rasa Merdeka* menerangkan bahwa sawah penduduk desa tersebut disewa f 100,- atau seumuran tebu. Ini merupakan sewa yang cukup murah, tidak sebanding hasilnya apabila digarap sendiri dengan ditanami padi.

Saja poenja sawah jang sekian banjaknja itoe, disewa oleh paberik seharga f 100,- dalem waktoe seoemoer teboe, sedang teboe itoe moelai ditanam sampai digiling adalah 18 boelan lamanja. Doeloe ketika masih saja tanami padi, dalem waktoe jang sekian

lamanja itoe bisa menghasilkan beberapa pikoel datjin padi jang harganya tentoe berlipat ganda dari pada sewa sawah jang di berikan padakoe oleh paberik itoe. Oeang seratoes roepiah, sekarang.... sebeloem sampai 18 boelan lamanja soedah habis saja makan djoega. Djadi.... djadi.... sekarang aja terpaksa pergi ke kota besar boeat mentjari penghidoepan. Barangkali di sana bisa memakai saja sebagai koelie. (Soemantri, 1924: 40-41).

Kromotjiloko sangat gelisah dan kecewa akan pemaksaan sewa lahan-lahan garapan yang murah. Padahal sebelum adanya sistem tersebut, kalau ditanami padi dalam waktu 18 bulan Kromotjiloko mampu menghasilkan padi beberapa pikul yang tentu harganya berlipat. Tidak sebandingnya uang sewa lahan oleh pemodal itulah yang menjadikan alasan Kromotjiloko pergi ke kota untuk menjadi kuli.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Mas Marco di *Sinar Djawa*, 26 Maret 1918 menyatakan bahwa "sebahu sawah oleh pabrik tidak lebih f 66,- (enam puluh enam rupiah) di dalam 18 bulan, yakni seumuran tebu; sawah sebahu kalau ditanami padi bisa tiga dalam 18 bulan, dan itu padi kalau dijual tidak kurang dari f 300,- (tiga ratus rupiah), jadi tiap-tiap sebahu sawah yang disewa pabrik, orang desa rugi f 234,- (dua ratus tiga puluh empat rupiah). Lagi pula semua sawah yang luas ditanami tebu itu tidak bisa baik lagi ditanami padi. Kalau menilik hal itu terang sekali orang-orang desa yang sawahnya disewakan pabrik itu tentu dengan akal yang tidak baik, sebab kalau tidak begitu, kami berani berkata, tentu orang desa tidak nanti sawahnya boleh disewa pabrik tebu." Penyewaan paksa inilah yang menjadi penyebab kemiskinan rakyat. Rakyat terpaksa harus menjadi kuli di kebun atau pergi

merantau ke kota besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Sulistyo, 1995).

Dalam sebuah surat kabar *Sinar Djawa*, 20 Februari 1918 menyatakan ada perintah dari pembesar *onderdeming*, yang menyewa tanah persawahan (milik rakyat) dengan *contract*, keluar dari lurah-lurah desa di atasnya. Kondisi *kromo* semacam ini dapat melihat di kawasan *vorstenlanden*. Para pemilik sawah pada akhirnya disuruh bekerja menggarap sawah yang disewa pembesar dengan gaji 20 cent sehari. "*Kromo* meskipun hanya mendapat 20 cent sehari, mendapat cacian dan makian yang amat kotor itu terpaksa berdiam diri, sebab ingat ia akan anak bini. INGGIH -DHORO - DALAM - LEPAT, kata *Kromo* !!! pada waktu menerima bayaran, *Kromo* tidak menerima genap, kata Bendoro tuan: 'bayaranmu kupotong saparo, sebab kau tidak bisa bekerja dan malas.' Hem !!! Laksana berjatuhan buah nyiur ke kepala *Kromo*, mendengar perkataan 'POTONG' itu. Sebetulnya dalam seminggu ia harus menerima f 0,20 x 6 = f 1,20, jebulnya f 0,60. Uang sekian dimakan dengan anak bini dalam seminggu !!!"

Kondisi dalam novel *Rasa Merdeka* dan keadaan konkrit dari surat kabar pada saat itu menjadikan suatu bentuk kristalisasi bahwa rakyat Hindia Belanda nampak sengsara dengan adanya sewa lahan oleh para pabrik tebu dengan cara paksa. Uang sewa dari pabrik tebu seharga f 100,- tidak mencukupi untuk kebutuhan selama 18 bulan. Kondisi seperti ini membangkitkan perlawanan dari rakyat pribumi yang berpendidikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya serikat-serikat buruh yang menyuarakan propaganda dan agitasi. Media surat kabar dan sastra dijadikan wadah utama untuk penyebaran ideologi-ideologi komunis sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat

secara luas. Penyadaran itu dilakukan dengan *vergadering* dari gerakan-gerakan radikal revolusioner Bumi-putera.

Selain itu tahun 1917-1918, terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya laju inflasi Indonesia. Inflasi yang begitu tinggi membuat para buruh resah akibat semakin menurunnya nilai nominal upah yang dihasilkan oleh buruh (Nasihin, 2012: 86). Akibat dari inflasi ini Takashi Shiraishi (2005: 147) menjelaskan pada akhir 1918 dan 1919 perjuangan ekonomi didirikan, yaitu dengan serikat-serikat buruh dan dilancarkannya pemogokan-pemogokan, seperti VSTP, PGHP (Perserikatan Goeroe Hindia Belanda), Perserikatan Boeroeh Tjitak, dan sebagainya. Pada musim panen dan penggilingan tahun 1919, PFB (Personeel Fabriek Bond) melakukan pemogokan diberbagai pabrik gula atas inisiatif sendiri untuk menuntut kenaikan upah, persamaan hak antara buruh Belanda dengan Bumiputera, perbaikan kondisi kerja, delapan jam kerja sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu, dan tambahan bayaran untuk kerja lembur.

Jadi tidak heran bahwa ideologi komunisme yang menjadi sarinya rasa dan cita-cita kaum buruh di dunia menariklah pada orang buruh Bumi-putera juga. Pekerjaan orang-orang komunis itu hanyalah mencampuri pergerakan-pergerakan Hindia dengan memaju-majukan ilmunya komunisme, memakai jalan pertama-tama membangun kekuatan-kekuatan kaum buruh dan kaum tani supaya keperluan hidupnya dua golongan ini bisa diperhatikan dengan memusuhi atau berlawanan pada pikiran-pikiran kaum modal umumnya. Pendapat ini diambil dari tulisan S.M (nama samaran) yang dimuat surat kabar *Si Tetap*, 30 Juni 1921 dengan judul "Hal Krietiek". Dalam tu-

lisan tersebut menjelaskan timbulnya perkumpulan I.S.D.V, selanjutnya berubah nama P.K.I (Partai Komunis India) yang ideologinya dibawakan oleh Sneelviet.

Dalam novel *Rasa Merdeka*, sosok Sastro dijadikan tokoh penggerak atau propagandis yang bekerja di sebuah surat kabar serikat buruh. Selain itu Soedarmo juga menjadi tokoh penting dalam milisi propaganda kepada masyarakat di desa-desa. Pandangan Marxis sebagai alat pemahaman sosial relitas yang dialami. Soedarmo beranggapan kalau sebab dari kesengsaraan rakyat adalah akibat dari struktur masyarakat yang ada, yakni masyarakat jajahan yang diperas oleh kaum pemodal.

Dari sini kita dapat memberikan suatu pengamatan awal, bahwa apa yang digambarkan novel *Rasa Merdeka* tidak sebatas sebagai cerita fiksi saja, tetapi cerminan realita sosial yang dialami rakyat Hindia Belanda pada waktu itu. Menurut Atmaja (2009: 27-28) novel semacam itu lebih mendekati "epik borjuis"; sebagai epik yang berbeda dari rekan klasiknya yang mengungkapkan kemiskinan dan keterasingan manusia dalam masyarakat modern. Modern dalam konteks novel *Rasa Merdeka* diterbitkan, ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik gula didirikan, alat transportasi kereta api yang berkembang pesat, perusahaan percetakan, perusahaan elektronik, termasuk serikat-serikat buruh pribumi mulai banyak berdiri sebagai bentuk protes atas kebijakan-kebijakan penguasa. Perkara yang demikian, Lukacs memberikan pada tipologi novel idealisme. Novel yang cenderung bersifat abstrak dan perwatakannya menunjukkan aktivitas tokoh utama, berikut adanya kesadaran yang masih dapat dihubungkan dengan dunia keseharian yang kompleks.

Kondisi Politik

Kondisi politik dalam novel *Rasa Merdeka* nampak dalam beberapa pengembangan cerita yang ada. Seperti sikap jongkok-sembah pada atasan, antara lain kepada Tuan Kontrolir (*controleur*). Soedjanmo berpendapat bahwa semua manusia itu sama derajatnya.

... laloe timboel nafsoe "minta dihormati" sebab orang merasa bahwa hidoepnja soedah lebih tjokoep dari pada kebanjakan orang. Napsae "minta dihormati" itoe tidak aken bisa kekal padanja (Soemantri, 1924: 28).

Meskipun ia doeloe ada dilahirkan di tanah Eruropa, tetapi sekarang ia soeka sekali dihormat-hormati oleh pegawai-pegawainja dengan memakai adat boemipoetera (Soemantri, 1924: 13)

Orang yang derajat ekonominya lebih tinggi dan status kepegangannya, mengharapkan minta dihormati dan disembah-sembah. Adat semacam ini tidak hanya berlaku untuk priyayi pribumi, tapi juga berlaku untuk para pejabat Belanda, seperti *controleur*. Walaupun Tuan Vlammenhart lahir di Belanda akan tetapi dia sangat menyukai untuk dihormati oleh pegawainya dengan adat Bumiputera.

Hal demikian, menjadi semacam masalah dari orang pergerakan pada waktu itu. Sikap hormat terhadap atasan, dalam realitasnya, merupakan suatu masalah yang berbeda dalam satu lingkaran. Baik atasan maupun bawahan sulit untuk menemukan jalan keluar. Yang lebih mengalami kesulitan adalah pihak bawahan, sebab jika tidak hatur hormat pada atasan, mereka takut kalau kena marah atau dilepas dari pekerjaannya. Akhirnya para bawahan berpegang pada anggapan *sembah tidak beli*

sadja kok (Yuliati, 2000: 110-111).

Menurut Yuliati (2000: 115-116), adat hormat adalah etika Bumiputera yang telah diperkuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Baik pegawai-pegawai Belanda maupun Bumiputera menghendaki bawahan harus bersikap hormat kepada mereka. Jika dipanggil atasannya ia harus berjalan jongkok sambil *hatur sembah* dan berbicara dengan bahasa Jawa *Kromo Inggil*. Setiap kali ia harus menyembah dari posisi duduknya di lantai. Semua aspek tingkah lakunya dan gaya hidup isterinya harus pula disesuaikan dengan posisinya sebagai bawahan.

Tampaknya adat-tradisi menjadi suatu keberatan dan dibenci bagi rakyat pribumi yang berpendidikan tinggi, terutama bagi kaum radikal anti kolonialis, dinggapnya sudah kuno. Dan adat hormat merupakan legitimasi kekuasaan kolonial dengan maksud memperkuat kekuasaan dalam hirarki pangreh praja. Pada pandangan lain Takashi Shiraishi (2005: 135) menggambarkan bahwa pimpinan-pimpinan CSI seperti Tjokroaminoto dan Goenawan serta anggota IP seperti Mas Marco membenci dan menyerang jongkok dan sembah sebagai adat *Mojopaitan* dan adat *kodokan*.

Karesteristik mengenai posisi pangreh praja bisa dilihat dalam Yuliati (2000: 113-114) yang dikutip dari tulisan Heather Sutherland (1979) bahwa pada pasal 67 dan 69 *Regeerings Reglement* (peraturan pemerintah) tahun 1854 pasal 67 peraturan ini berbunyi: "sejauh keadaan mengizinkan, masyarakat Bumiputera ditempatkan di bawah pengawasan kepala-kepala mereka sendiri yang diangkat dan diakui oleh pemerintah, dan mereka harus tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi semacam itu sebagaimana ditetapkan oleh perintah Gubernur Jendral baik secara umum maupun khusus."

Yuliati (2000: 114) menambahkan, sebagai akibat peraturan ini, para Bupati menjadi pemimpin rakyat dan wibawa serta kharisma mereka yang turun temurun merupakan jaminan kesetiaan rakyat. Urusan administrasi bisa tetap dipegang oleh pejabat yang lebih rendah, yaitu patih dan wedono. Kondisi ini menjadikan masyarakat tidak mampu berbuat leluasa kecuali tunduk terhadap para pemimpin.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda jelas-jelas bersifat istana sentris. Keturuhan para pejabat pemerintah akan menjadi pewaris orang tuanya. Hal ini untuk mempertahankan politik pemerintah Belanda agar status eksploitasi semua harta kekayaan Hindia Belanda tanpa mengalami kendala. Disamping itu tingkat kewibawaan secara turun temurun setidaknya sebagai simbol jaminan kesetiaan rakyat.

Sebagai pelaksanaan, kondisi demikian mempengaruhi adat yang ditetapkan kaum priyayi. Rakyat pribumi dari golongan *wong cilik* (buruh) sebagai korban penghisapan dan bermental rendah. Dampak psikologi perbedaan kepangkatan itu pada akhirnya mempengaruhi kelas di bawahnya, sikap jongkok dan sembah menjadi adat keharusan yang dilakukan saat menghadap atasan. Adat seperti ini merupakan etika Bumiputera yang diperkuat oleh pemerintah kolonial Belanda atas dasar politik.

Dari sini terlihat bahwa ber-sumber dari sistem pemerintah yang semakin terpuruk, rakyat yang sadar untuk perbaikan syarat-syarat ekonomi, sosial, dan politik, para buruh menyatukan diri dalam wadah organisasi berupa serikat-serikat buruh. Di dalam masyarakat kapitalis, pentingnya menyatukan diri adalah karena kaum buruh menghadapi kekuatan-kekuatan yang berpotensi unggul. Kendati tidak

keluar dari jangkauan kapitalisme, serikat buruh yang baru saja muncul dan bergerak, sudah menghadapi tindakan-tindakan represif pihak majikan-majikan kapitalis dan pemerintah-pemerintah borjuis. (Soegiri DS, 2003: 7).

Penyebaran bacaan merupakan hal pokok dari pergerakan, sebagai pengikat dan roda mesin sosial demokrasi. Disamping itu, kaum pergerakan sering menggunakan istilah "Hikajat". Kata ini memberi pemahaman kepada pendukungnya tentang sejarah kekuasaan masyarakat kolonial. *Hikajat* merupakan *message* kepada para pembaca untuk memahami tahap-tahap perkembangan sejarah hubungan-hubungan produksi dan kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

SIMPULAN

Novel *Rasa Merdeka* memberikan petunjuk mengenai situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk tradisi dan pandangan hidupnya. Tempat-tempat terjadinya peristiwa seperti di desa, di kota, stasiun, rumah makan, tempat hiburan, tempat kerja, dan di *vergadering* tentu memiliki ciri dan suasana kekhasan yang menandainya. Penggambaran tempat tertentu dengan peristiwa kekhususan secara utuh biasanya syarat akan ideologi dan pemikiran masyarakat yang mampu memberikan makna secara keseluruhan.

Selain dari itu pesan dan nilai yang dilakukan tokoh-tokoh dalam novel *Rasa Merdeka* mengajarkan rakyat untuk menjadi pintar dan bersikap kritis terhadap peraturan yang berlaku sewenang-wenang. Tokoh-tokoh di dalamnya menawarkan ideologi komunis-internasionalisme yang dianutnya, menyodorkan konsep ekonomi berbasis kerakyatan yang seharusnya di terap-

kan di tanah Hindia Belanda.

Propaganda yang berhaluan internasionalisme dalam novel *Rasa Merdeka* mampu mengkristalisasikan kondisi zamannya. Perjuangan kelas sosial dan kritik tradisi menjadi dasar utama ide novel ini diciptakan. Namun, untuk memahami permasalahan itu tidak bisa terlepas melalui sumber pijakan sosiologi sastra Marxisme yang diutarakan Goldmann dan Umar Junus memanfaatkan karya semacam ini sebagai sebuah dokumen sosiobudaya. Sastra menyuarakan suara kelas tertentu, sehingga sastra dapat disederhanakan dalam bentuk perjuangan kelas atau bahkan mengajarkan ideologi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Damono, S. D. 2002. *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Atmaja, J. 2009. *Kritik Sastra Kiri*. Denpasar: Udayana University Press.
- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elizabeth Burns and Tom Burs. 1973. *Middlesex*: Penguin Books.
- Cahyono, E. 2003. *Jaman Bergerak di Hindia Belanda: Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempoe Doeloe*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Damono, S. D. 1979. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Depdikbud.
- Endraswara, S. 2013. *Prinsip, Falsafah, dan Penerapan Teori Kritik Sastra*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service CAPS.
- Gie, S. H. 1999. *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Joe, L. T. 2004. *Riwayat Semarang*. Jakarta: Hasta Wahana.
- Junus, U. 1986. *Sosiologi Sastra Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia.

- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasihin. 2012. *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paraptodiharjo, S. 1952. *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Jawa*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Ratna, N. K. 2011. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Razif. 2005. *Bacaan Liar Budaya dan Politik pada Zaman Pergerakan*. Jakarta: Edi Cahyono Experience.
- M.C.Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shiraishi, T. 2005. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. H. Farid, Trans. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sulistyo, B. 1995. *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sumarjo, Y. 1979. *Masyarakat dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: CV. Nur Cahaya.
- Soemantri. 1924. *Rasa Merdeka*. Semarang: Drunk-kerij VSTP.
- Toer, P. A. 2003. *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Wiyatmi. 2006. *Pengantar Kajian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka kelompok penerbit Pinus.
- Yuliati, D. 2000. *Soemaoen: Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera.
- Cahyono, Soegiri DS dan Edi. 2003. *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Swingwood, A. S. 1973. *The Sociology of Literature*. London: Paladin.

Surat Kabar

- Sinar Hindia*, 18 Januari 1918
Sinar Djawa, 31 Januari 1918
Sinar Djawa, 9 Februari 1918
Sinar Djawa, 20 Februari 1918
Sinar Djawa, 26 Maret 1918
Sinar Djawa, 26 Maret 1918
Si Tetap, 30 Juni 1921